

BAB VI

KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi strategi diversifikasi ekonomi Bahrain melalui penyelenggaraan Formula 1 dalam kerangka Bahrain Economic Vision (BEV) 2030 berjalan secara asimetris. Manuver Bahrain menggunakan *State Capitalist Sport* (Grix & Wolfe, 2012) berhasil secara substansial pada aspek infrastruktur fisik dan akumulasi kapital, namun gagal berkonversi menjadi peningkatan reputasi internasional yang utuh. Kesenjangan ini membuktikan bahwa keberhasilan operasional dan rekayasa ekonomi dari sebuah *mega-event* olahraga tidak secara otomatis memperbaiki citra global suatu negara (*competitive identity*) apabila mengabaikan fondasi pemerataan kesejahteraan domestiknya.

Keberhasilan yang bersifat asimetris tersebut terlihat pada pemenuhan pilar *Sustainability* dan *Competitiveness*. Pada pilar *Sustainability*, kapasitas intervensi negara terbukti mutlak melalui transisi Bahrain International Circuit (BIC) menuju 100% energi terbarukan dan status *net-zero venue*, meski negara tetap tidak memiliki kuasa untuk mereformasi ekologi emisi global rantai pasok Formula 1 secara sistemik (Scope 3). Sementara itu, pilar *Competitiveness* dimanifestasikan secara konkret melalui akuisisi penuh “McLaren” oleh Mumtalakat Holding Company yang sukses mendongkrak Penanaman Modal Asing (FDI) hingga USD 43,47 miliar. Namun, manuver ini memiliki kerentanan struktural akibat asimetri kapital fiskal Bahrain yang jauh lebih kecil dibandingkan hegemoni modal raksasa Arab Saudi (PIF) dan Uni Emirat Arab dalam *Global Sporting Arms Race* kawasan Teluk.

Di sisi lain, pilar *Fairness* menjadi titik terlemah yang menggagalkan amanat normatif BEV 2030 dan memicu paradoks reputasi internasional. Meskipun kebijakan *Bahrainization* berupaya membuka akses lapangan kerja vokasi, dominasi tenaga kerja ekspatriat yang mencapai 80–85% di sektor penyokong *hospitality* menciptakan kebocoran ekonomi (*economic leakage*)

Rizky Haykal Ahmad Darmawan, 2026

IMPLEMENTASI DIVERSIFIKASI EKONOMI BAHRAIN DALAM MEWUJUDKAN VISI PEMBANGUNAN
2030 MELALUI PELAKSANAAN FORMULA 1

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

masif melalui remitansi. Akibatnya, pilar ini menjadi yang paling timpang di lapangan; manfaat ekonomi langsung dari gemerlap sirkuit Formula 1 tidak terdistribusi secara proporsional kepada warga lokal, membuktikan bahwa negara mampu merekayasa investasi aset tingkat tinggi, tetapi gagal mendistribusikan keadilannya secara riil di tingkat pekerja.

Ketimpangan pilar Fairness inilah yang secara langsung menjawab konklusi utama bahwa keberhasilan State Capitalist Sport di Bahrain bersifat asimetris: sukses memacu akumulasi modal makro, namun gagal menciptakan inklusi sosial di tingkat mikro. Persepsi negatif global terhadap isu tata kelola dan asimetri sosial pada akhirnya menenggelamkan capaian impresif di sektor pariwisata. Pada akhirnya, strategi Formula 1 Bahrain bukanlah kegagalan mutlak, melainkan bukti empiris dari manuver rasionalitas terbatas (*satisficing*). Sebagai negara dengan kekuatan kapital yang paling terbatas di kalangannya, Bahrain telah menembus batas maksimal (*ceiling*) kemampuannya dalam kapitalisme olahraga global: mereka mampu merekayasa kemajuan teknologi dan infrastruktur hijau untuk bertahan, namun tidak akan pernah bisa merekayasa persepsi global atas ketimpangan sosial-politiknya sendiri.

6.2 Saran

6.2.1 Saran Akademis

Pertama, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif lintas negara Gulf Cooperation Council (GCC) mencakup Bahrain, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar guna memetakan secara sistematis bagaimana skala kapital Sovereign Wealth Fund yang berbeda menghasilkan strategi State Capitalist Sport yang berbeda pula. Penelitian ini telah menunjukkan bahwa Bahrain, dengan keterbatasan fiskal dibandingkan tetangganya, menempuh jalur diferensiasi teknologi dan venue, sementara studi komparatif dapat menguji apakah pola serupa konsisten berlaku pada negara Teluk lain dengan kapasitas modal yang berbeda-beda.

Kedua, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengintegrasikan kerangka assemblage theory dari Brannagan, Grix, dan Norrito (2025) secara lebih mendalam untuk membaca fenomena sportswashing tidak sebagai keberhasilan atau kegagalan linear dari negara, melainkan sebagai pertarungan naratif antara negara dan jejaring aktor non-negara (media internasional, organisasi hak asasi manusia, dan akademisi) yang turut membentuk persepsi global. Pendekatan ini akan memperkaya analisis di luar logika sebab-akibat sederhana antara investasi olahraga dan reputasi negara.

Ketiga, dan secara khusus relevan bagi pengembangan keilmuan hubungan internasional dan diplomasi olahraga di Indonesia, penelitian ini merekomendasikan agar akademisi Indonesia mulai mengembangkan kajian sistematis terhadap mega-event olahraga domestik MotoGP Mandalika, Formula E Jakarta, dan F1Powerboat Danau Toba menggunakan pendekatan pengukuran reputasi negara yang lebih komprehensif, mencakup tidak hanya capaian ekonomi dan pariwisata, tetapi juga aspek pemerataan sosial dan tata kelola yang kerap luput dari narasi resmi pemerintah. Sebagaimana ditemukan dalam kasus Bahrain, aspek pemerataan sosial dan tata kelola kerap menjadi titik rawan yang justru menentukan apakah investasi mega-event benar-benar terkonversi menjadi modal reputasi, atau sebaliknya menjadi bumerang citra yang justru menentukan apakah investasi mega-event benar-benar terkonversi menjadi modal reputasi, atau sebaliknya menjadi bumerang citra. Riset semacam ini masih sangat terbatas pada konteks Indonesia dan menjadi celah akademis yang penting untuk diisi, mengingat skala investasi negara pada sport *diplomacy* domestik yang terus meningkat.

6.2.2 Saran Praktis

Pertama, bagi pemerintah Bahrain, penelitian ini merekomendasikan penguatan struktural terhadap inisiatif Skills Bahrain agar kesenjangan kompetensi antara tenaga kerja lokal dan kebutuhan riil industri Formula 1 khususnya pada sektor hospitality dan teknis otomotif

dapat ditutup secara berkelanjutan. Penguatan ini perlu disertai evaluasi berkala terhadap rasio serapan tenaga kerja lokal di sektor-sektor turunan Formula 1, agar pilar Fairness tidak hanya terukur dari jumlah penerima manfaat program Tamkeen, tetapi juga dari peningkatan riil kualitas dan daya saing tenaga kerja domestik dalam jangka panjang.

Kedua, bagi pemangku kepentingan Indonesia khususnya ITDC, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga penelitian ini merekomendasikan replikasi model intervensi Tamkeen dan Skills Bahrain dalam skala domestik, terutama pada kawasan penyelenggaraan mega-event seperti Mandalika. Replikasi ini perlu berbentuk program vokasi terstruktur dan terukur yang secara spesifik menasar masyarakat lokal di sekitar venue, mencakup pelatihan manajemen sirkuit, hospitality, dan rantai pasok pariwisata, sehingga warga Lombok tidak hanya menjadi penonton pasif dari hajatan besar yang berlangsung di wilayahnya sendiri, melainkan turut menjadi penerima manfaat ekonomi yang setara dengan skala investasi yang ditanamkan negara.

Ketiga, masih bagi Indonesia, penelitian ini merekomendasikan agar evaluasi keberhasilan mega-event olahraga nasional tidak lagi dibatasi pada indikator makro seperti jumlah wisatawan dan nilai investasi yang masuk, melainkan turut menyertakan indikator distribusi manfaat ekonomi lokal dan tingkat keterlibatan tenaga kerja domestik secara transparan dan terbuka kepada publik. Pelajaran dari asimetri pencapaian Bahrain Economic Vision 2030 menunjukkan bahwa daya saing ekonomi jangka panjang bergantung pada konsistensi antara narasi yang dipromosikan ke luar negeri dan substansi kesejahteraan yang dapat dirasakan dan diverifikasi oleh masyarakat di dalam negeri. Dengan demikian, investasi besar Indonesia pada sport diplomacy dapat benar-benar terkonversi menjadi modal reputasi yang berkelanjutan, bukan sekadar pencitraan jangka pendek yang berisiko menjadi bumerang di kemudian hari.